

**PERFORMA PENGELOLAAN AGROFORESTRI
DI WILAYAH KPHL RAJABASA**

(Skripsi)

Oleh

LIA MULYANA



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERFORMA PENGELOLAAN AGROFORESTRI DI WILAYAH KPHL RAJABASA

Oleh

LIA MULYANA

Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengelola hutan negara, salah satunya dilakukan melalui pola tanam agroforestri di hutan desa. Pengelolaan agroforestri yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak (*stakeholder*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui performa pengelolaan agroforestri pada lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rajabasa, serta peran *stakeholder* dalam pengelolaan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan performa pengelolaan agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa dalam performa sedang (produktivitas 84; keberlanjutan 167; keadilan manfaat 88; dan efisiensi 168). Performa tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan hutannya, yaitu penguasaan lahan dan hasil hutan yang dikuasai secara individu, orientasi usaha agroforestri bersifat komersial dan struktur hutan merupakan agroforestri kompleks. Pengelolaan agroforestri yang dijalankan tersebut difasilitasi dan

Lia Mulyana

didukung oleh *stakeholder* terkait yang berkerjasama dalam membantu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sumur Kumbang memperoleh izin hutan desa. *Stakeholder* tersebut yaitu KPHL Rajabasa, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, LSM Wanacala, Kepala Desa Sumur Kumbang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDAS HL) Way Seputih Way Sekampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Komisi B Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan Camat Kalianda. Oleh karena itu, KPHL Rajabasa serta *stakeholder* terkait harus mengembangkan kapasitas masyarakat dan menguatkan kelembagaan lokal secara terus menerus, sehingga hutannya dapat dikelola secara adil, bermanfaat dan berkelanjutan.

Kata kunci : agroforestri, Hutan Desa, KPHL, performa.

ABSTRACT

PERFORMANCE OF AGROFORESTRY MANAGEMENT IN THE AREA OF RAJABASA PROTECTED FOREST MANAGEMENT UNIT

By

LIA MULYANA

Community based forest management program provides access for the community to participate in managing state forests; one of which is done through agroforestry system in the village forest. Management of the agroforestri community perpetrated is inseparable from the role and support of the stakeholders. The purpose of this study is to know the performance of agroforestry management by community of Sumur Kumbang village in the Rajabasa protected forest management unit and role of the stakeholders in agroforestry management. The data collection was done by observation and interview. The results show the performance of agroforestry management belong to the moderate performance (productivity 84; sustainability 167; benefits fairness 88; and efficiencies 168). Performance is greatly influenced by the system of forest management, such as land tenure and forest products which were controlled individually, commercial agroforestry orientation and structure of the forest were a complex agroforestry. The Agroforestri management which do by community Sumur Kumbang is

facilitated and supported by stakeholders related partners in helping manager institution village forest Sumur Kumbang to obtain the permission of village forest. These stakeholders are Rajabasa protected forest management unit, Lampung Regency South Forestry, non-governmental organizations Wanacala, head of the village Sumur Kumbang, Central Management of Watershed Protection Forest Way Seputih Way Sekampung, Forestry Office of Lampung Province, Department of Food Crops Horticulture and Plantation South Lampung regency, the Commission and the Economic and Financial Regional Representatives Council South Lampung District, the Environment Agency South Lampung regency and district head Kalianda. Therefore, Rajabasa protected forest management unit and relevant stakeholders should develop the capacity of community and strengthen local institutions continuously, so that the forest can be managed in a fair, useful and sustainable.

Key word : agroforestry, village forest, protected forest management unit, performance.

**PERFORMA PENGELOLAAN AGROFORESTRI
DI WILAYAH KPHL RAJABASA**

Oleh

LIA MULYANA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA KEHUTANAN

Pada

Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERFORMA PENGELOLAAN AGROFORESTRI
DI WILAYAH KPHL RAJABASA**

Nama Mahasiswa : **Lia Mulyana**

No. Pokok Mahasiswa : **1214151035**

Jurusan : **Kehutanan**

Fakultas : **Pertanian**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
NIP 19740222 200312 1001

Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.
NIP 19760123 200604 1 001

2. Ketua Jurusan Kehutanan

Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.
NIP 19770503 200212 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.

Sekretaris : Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.

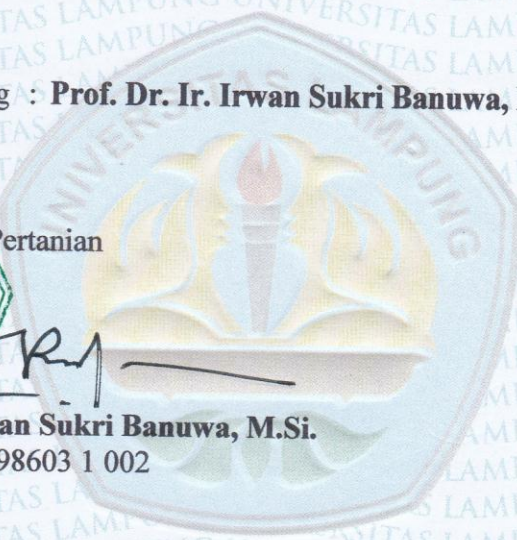
Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

NIP 19611020 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 April 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 04 September 1994, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Bapak Ali Yunirsyah dan Ibu Pujiyati, S.Pd.I. Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Pertiwi Kotabumi Lampung Utara tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 3 Gapura Kotabumi Lampung Utara dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Kotabumi Lampung Utara, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kotabumi Lampung Utara yang diselesaikan tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) pada tahun 2012. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyilva) di Bidang IV Komunikasi, Informasi dan Pengabdian Masyarakat pada tahun 2013-2015. Penulis mengikuti kegiatan magang mahasiswa bakti rimbawan di KPHL Rajabasa Unit XIV Provinsi Lampung pada bulan Juli-November tahun 2016. Kegiatan tersebut merupakan program dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM).

Saya persembahkan karya ini untuk umi tercinta yang menjadi kekuatan dalam kehidupan, sehingga saya memiliki mimpi. Beliau yang selalu terjaga di setiap malam untuk mendoakan saya, kemudian bekerja tanpa henti di siang hari untuk membahagiakan saya. Teruntuk abi yang berada di sisi sang pemilik jiwa dan adik-adik saya Sintia Handa Yani, Muhammad Fajar Sentoso dan Suci Aryamita.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala izin dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Performa Pengelolaan Agroforestri di Wilayah KPHL Rajabasa” sebagai salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Kehutanan dan tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung juga sebagai dosen penguji skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung juga sebagai dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dalam memperlancar segala proses administrasi penulis.
3. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing utama yang selalu sabar dalam membimbing, memotivasi, memberikan saran dan masukan, serta mengalokasikan waktunya bagi penulis.

4. Bapak Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing kedua penulis yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan proses skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan kehutanan yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Pertanian yang telah membantu dalam memperlancar keperluan administrasi.
7. Bapak Khoirul Anwar, S.E., selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rajabasa dan staf di KPHL Rajabasa (Iqbal Amirudin Ihsanu, Mares Ersan, Reki Chandra, Muhammad Rifki, Dodi Prinata, Harfya Andwihayati, Meri Karisma, Sri Masruroh dan Cornia Aprilia) yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Keluarga tercinta ayah Ali Yunirsyah, ibu Pujiyati dan adik-adik penulis Sintia, Fajar dan Suci yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan kekutan dalam menjalani hidup.
9. Rekan-rekan Himasyilva dan EVESYL atas kebersamaan, dukungan, semangat dan canda tawa yang diberikan selama perkuliahan.
10. Almamaterku tercinta.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan namun, inilah kerja keras yang terbaik yang dapat penulis berikan. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, Juni 2017
Penulis

Lia Mulyana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Penelitian	5
F. Kerangka Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kehutanan Masyarakat.....	9
B. Agroforestri	12
C. Performa Pengelolaan Agroforestri.....	17
III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
B. Alat dan Objek Penelitian.....	21
C. Jenis Data	21
D. Sumber Data.....	23
E. Metode Pengambilan Sampel	24
F. Analisis Data.....	28
IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. KPHL Rajabasa	33
1. Letak dan Luas KPHL Rajabasa	34
2. Keadaan Biofisik KPHL Rajabasa	33
3. Sejarah KPHL Rajabasa.....	36
4. Potensi Wilayah KPHL Rajabasa	37
B. Desa Sumur Kumbang.....	41
1. Letak dan Luas Desa Sumur Kumbang.....	41
2. Gambaran Umum Masyarakat Desa Sumur Kumbang.....	42
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sumur Kumbang	43

	Halaman
C. Karakteristik Umum Responden Penelitian	46
1. Umur	47
2. Tingkat Pendidikan	48
3. Jumlah Anggota Keluarga.....	47
4. Mata Pencarian.....	49
5. Luas Kepemilikan Lahan Agroforestri.....	49
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Pengelolaan Hutan dan Performa Agroforestri	51
1. Sistem Pengelolaan Hutan	52
2. Performa Pengelolaan Agroforestri di Desa Sumur Kumbang.....	54
B. Analisis <i>Stakeholder</i>	63
1. Pemetaan <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Agroforestri di Hutan Desa yang Dikelola oleh Masyarakat Desa Sumur Kumbang.....	63
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	85
Tabel 17-20	86-92
Peraturan Desa Sumur Kumbang tentang Hutan Desa	97-107
Peraturan Desa Sumur Kumbang tentang Pembentukan LPHD	108-113

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Matriks hubungan hipotetik dari variabel sistem pengelolaan hutan dan performanya	28
2. Variabel performa	30
3. Matriks analisis kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan agroforestri	31
4. Tutupan lahan di wilayah KPHL Rajabasa	37
5. Jenis-jenis satwa liar yang dapat ditemukan di wilayah KPHL Rajabasa	38
6. Luas wilayah menurut penggunaan	41
7. Jumlah penduduk di Desa Sumur Kumbang	44
8. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sumur Kumbang	45
9. Sebaran umur responden	47
10. Tingkat pendidikan responden	47
11. Jumlah anggota keluarga responden	48
12. Mata pencarian pokok responden	49
13. Luas kepemilikan lahan agroforestri responden	50
14. Matriks hubungan antara variabel sistem pengelolaan hutan dan performanya	51
15. Performa agroforestri di Desa Sumur Kumbang	54
16. Matriks analisis kepentingan (<i>interest</i>) dan pengaruh (<i>power</i>) <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan agroforestri	63

Tabel	Halaman
17. Karakteristik umum responden LPHD Sumur Kumban.....	86
18. Pendapatan agroforestri LPHD Sumur Kumbang	87
19. Biaya dan keuntungan pengelolaan agroforestri di LPHD Sumur Kumbang	89
20. Nilai variabel performa agroforestri	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema kerangka penelitian	8
2. Pemetaan <i>stakeholder</i> berdasarkan kepentingan (<i>interest</i>) dan pengaruhnya (<i>power</i>) dalam pengelolaan agroforestri di hutan desa yang berada di wilayah KPHL Rajabasa.....	32
3. Peta kawasan hutan lindung KPHL Rajabasa	34
4. Pemetaan <i>stakeholder</i> berdasarkan kepentingan (<i>interest</i>) dan pengaruhnya (<i>power</i>) dalam pengelolaan agroforestri di hutan desa yang berada di wilayah KPHL Rajabasa	71
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa	93-96

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehutanan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini. Pembangunan kehutanan di Indonesia tidak lagi berlandaskan pada penambangan kayu (*timber extraction*) ataupun manajemen kayu (*timber management*) (Suharjito, 2014). Sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat telah banyak dilakukan dan diterapkan di hutan negara.

Program-program kehutanan masyarakat yang diterapkan di hutan negara dirancang sebagai sebuah program yang memberi ruang bagi masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi mengelola hutan negara (Abdurrahim, 2015). Adapun bentuk-bentuk dari program tersebut, antara lain: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan. Oleh karena itu program kehutanan masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan yang sebelumnya sering muncul, yaitu: keterbatasan akses masyarakat atas wilayah hutan dan sumber daya di dalamnya, kemiskinan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, kerusakan ekosistem di dalam hutan, serta ketimpangan kepemilikan lahan antara negara dan masyarakat (Anomsari, 2014).

Menurut Suharjito *et al.* (2013), peran masyarakat lokal dapat memecahkan masalah krisis lingkungan hidup dan kemiskinan. Studi yang dilakukan Febryano *et al.* (2014), menunjukkan bagaimana tindakan kolektif dalam pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat didorong oleh keberadaan kelembagaan lokal. Hal ini didukung dengan penelitian Iskandar *et al.* (2013), bahwa penguatan kelembagaan kelompok tani dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan bagaimana mereka melakukan pengelolaan lahan hutan, sehingga perlu penerapan pola tanam yang tepat dan sesuai. Salah satu alternatif pengelolaan lahan hutan yang sudah dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menerapkan pola tanam agroforestri. Nair (1993), menjelaskan bahwa agroforestri adalah sistem penggunaan lahan terpadu, yang memiliki aspek sosial dan ekologi, dilaksanakan melalui pengkombinasian pepohonan dengan tanaman pertanian dan atau ternak (hewan), baik secara bersama-sama atau bergiliran.

Pengelolaan agroforestri yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak (*stakeholder*) yang juga memiliki pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan agroforestri. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Martin *et al.* (2010), bahwa *stakeholder* memiliki peran penting dalam pemanfaatan lahan hutan yang dikuasai negara (*state property regime*) untuk usaha berbasis agroforestri, peran tersebut dapat berupa fungsi kontrol, bantuan fisik, bantuan teknis dan dukungan penelitian (Kadir, 2013). Berdasarkan

hal tersebut dapat diketahui hal-hal apa saja yang telah dilakukan *stakeholder* dalam mendukung atau memfasilitasi pengelolaan agroforestri.

Agroforestri telah dikenal sejak lama oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah repong damar yang dikembangkan oleh penduduk Krui di Lampung Barat (De Foresta *et al.*, 2000). Penelitian Senoaji (2012), mengungkapkan bahwa agroforestri di Banten Selatan berupa kebun sengan campuran telah menjadi budaya masyarakat Baduy Luar. Penelitian Lestari dan Premono (2014), di Kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan bahwa penerapan agroforestri memberikan banyak manfaat dalam melindungi flora fauna, menjaga lingkungan, serta mengurangi pemanasan global. Sejalan dengan hal di atas, Sitepu (2014), menyatakan bahwa agroforestri yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukaluyu, Bogor, Jawa Barat memberikan kontribusi pendapatan lebih besar dari pada pendapatan yang berasal dari non agroforestri.

Pengelolaan agroforestri yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah memiliki performa yang berbeda. Performa tersebut sangat penting untuk diketahui agar pengelolaan agroforestri dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, meningkatkan distribusi sumber daya hutan secara adil dan menjaga kelestarian hutan.

Meskipun sejumlah kajian tentang agroforestri telah banyak dilakukan; namun kajian-kajian tersebut belum menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana performa atau tampilan pengelolaan agroforestri yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan lindung. Saat ini kawasan hutan lindung dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai pengelola di tingkat tapak.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui performa pengelolaan

agroforestri tersebut, sehingga kawasan hutan lindung dapat dikelola secara adil, sejahtera dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan hutan lindung seperti deforestasi dan degradasi, salah satunya karena ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya hutan dari masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui program kehutanan masyarakat memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola hutan. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan menerapkan pola agroforestri, dimana performa pengelolaannya sangat penting untuk diketahui.

Permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pengelolaan hutan dan performa agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa?
2. Bagaimana peran *stakeholder* dalam mendukung atau memfasilitasi pengelolaan agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut.

1. Menjelaskan sistem pengelolaan hutan dan performa agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa.

2. Menjelaskan peran *stakeholder* dalam mendukung atau memfasilitasi pengelolaan agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan manfaat berupa informasi kepada masyarakat desa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) tentang performa atau tampilan pengelolaan agroforestri yang selama ini telah dilakukan sehingga menjadi pertimbangan bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan KPHL Rajabasa untuk melakukan perbaikan.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wilayah KPHLRajabasa yang dikelola oleh LPHD di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan seluas 217 Ha.
2. Kata performa diartikan menyelenggarakan atau tampilan di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Performa dapat diketahui dengan mengukur keempat variabel performa yaitu produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat dan efisiensi (Suharjito *et al.*, 2000).
3. Sistem pengelolaan yaitu suatu cara atau manajemen yang digunakan dalam mengelola hutan, dalam hal ini yang akan dilihat adalah penguasaan lahan dan hasil hutan, orientasi usaha dan struktur hutan.
4. *Stakeholder* adalah orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan (Salam *et al.*, 2006).

Stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah LSM Wanacala, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, KPHL Rajabasa, Kepala Desa Sumur Kumbang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDAS HL) Way Seputih Way Sekampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Komisi B Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan Camat Kalianda.

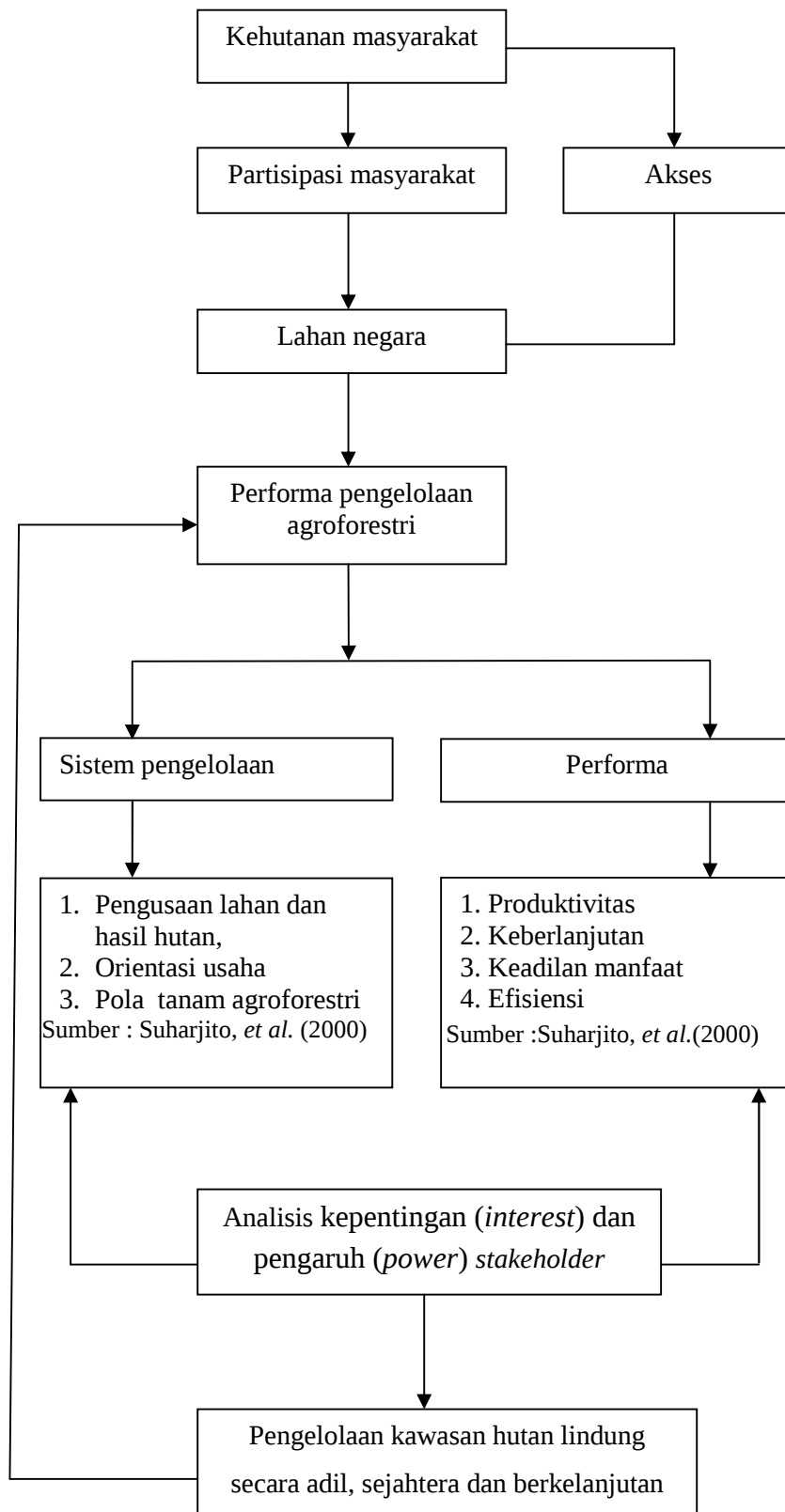
F. Kerangka Penelitian

Program kehutanan masyarakat memberi akses bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk ikut serta dalam mengelola hutan. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat menggunakan pola tanam agroforestri. Agroforestri yang selama ini telah berjalan belum diketahui bagaimana performanya, sedangkan hal tersebut penting diketahui masyarakat agar pengelolaan hutan yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan menjaga kelestarian hutan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait performa atau tampilan pengelolaan agroforestri dengan melihat sistem pengelolaan dan performa. Penelitian ini mengadopsi dari Suharjito *et al.* (2000), dalam bukunya pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat yang menjelaskan performa praktik-praktik kehutanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Suharjito *et al.* (2000), sistem pengelolaan terdiri atas penguasaan lahan dan hasil hutan,

orientasi usaha, dan pola tanam agroforestri; sementara performa adalah produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat dan efisiensi.

Sistem pengelolaan dan performa dikaji melalui matriks hubungan hipotetik, namun pada praktik-praktik tersebut tidak memberikan representasi secara kuantitatif dari performa, maka dalam penelitian ini dimodifikasi untuk variabel dari performa akan digambarkan secara kuantitatif dan untuk variabel dari sistem pengelolaan dijelaskan secara deskriptif. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mendukung performa pengelolaan agroforestri dengan melihat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) sehingga pengelolaan kawasan hutan lindung dapat dilakukan secara adil, sejahtera dan berkelanjutan.



Gambar 1. Skema kerangka penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kehutanan Masyarakat

Kata “sosial” dalam kehutanan sosial menunjuk keberadaan dan fungsi hutan, yang merupakan komponen dari satu kesatuan sistem (ekosistem) hutan dan masyarakat lokal. Tujuan pengembangan ilmu kehutanan sosial adalah untuk menyiapkan tenaga ahli yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan kehutanan masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat desa hutan khususnya dan masyarakat yang lebih luas melalui pengelolaan hutan yang lestari (Suharjito, 2014).

Terdapat empat landasan untuk mengembangkan ilmu kehutanan sosial. Pertama, keberadaan praktik-praktik *community forestry* (kehutanan masyarakat) tersebar di berbagai wilayah Indonesiadan negara-negara lain, baik di barat maupun timur, utara maupunselatan. Kedua, keberadaan praktik kehutanan masyarakat merupakan sumber pengetahuan, sebagai landasan epistemologis. Kehutanan masyarakat merupakan objek penelitian karena ada fakta-fakta atau gejala-gejala empiris yang dapat diamati dan diukur. Ketiga, berdasarkan pandangan metodologis, penelitian dan pengembangan ilmu kehutanan masyarakat dapat dilakukan secara induktif dan deduktif. Kempat, berdasarkan pandangan aksiologis, praktik-praktik kehutanan masyarakat menunjukkan adanya

pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun oleh para pelaku praktik kehutanan masyarakat (Suharjito, 2014).

Penelitian Firmansyah (2013), mengungkapkan bahwa kehutanan masyarakat adalah segala bentuk pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan masyarakat dengan cara-cara tradisional dalam bentuk kelompok dan pengelolaan sumber daya hutannya dilakukan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional. Pulhin (2006), menyatakan di Filipina kehutanan masyarakat merupakan strategi utama dalam mengelola lahan hutan. Dampak lingkungan dari kehutanan masyarakat dan teknologi sebagian besar positif seperti konservasi hutan alam, keanekaragaman hayati, konservasi tanah dan air, penyerapan karbon dan produksi biomassa dengan cara penanaman pohon.

Menurut Winata dan Yuliana (2012), partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak terkait secara aktif dalam rangkaian kegiatan, mulai dari kehadiran petani dalam rapat kelompok tani hutan, kehadiran dalam rapat perencanaan, dan sumbangan pemikiran dalam perencanaan. Pada kegiatan pelaksanaan, partisipasi yang diukur adalah petanimenanam tanaman pokok dan tanaman semusim pada lahan garapan, sedangkan dalam kegiatan evaluasi adalah kehadiran petani pada rapat evaluasi dan sumbangan pemikiran dalam rapat evaluasi.

Darusman (2012), memberikan argumentasi mengapa partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan penting, yaitu (1) fakta yang sangat otentik bahwa jumlah mereka banyak, memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjadi

pendukung, atau sebaliknya menjadi perusak; (2) mereka adalah bagian atau unsur dari ekosistem hutan yang saling tergantung; (3) mereka adalah warga bangsa yang ingin sejahtera, berhak untuk mendapatkan keadilan, berhak untuk berperan dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka bertempat tinggal. Salampessy *et al.* (2015), juga menyatakan bahwa partisipasi dalam bentuk modal budaya dan pengetahuan ekologi tradisional yang diterapkan melalui upaya konservasi seperti yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Ambon, Maluku dapat mempertahankan kelestarian sumber daya hutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk studi yang dilakukan Sadono menunjukkan (2013), bahwa masyarakat Desa Jeruk sebagai salah satu desa penyangga dalam pengelolaan hutan memberikan kontribusi kegiatan pengelolaan hutan dalam bentuk pikiran, saran, dan tenaga. Pada level perencanaan, peran serta masyarakat bersifat konsultatif; peran pengelola hutan cenderung dominan dalam merencanakan dan mendisain program kegiatan. Masyarakat yang ikut dalam kegiatan tersebut mendapatkan insentif. Dalam pengawasan dan perlindungan kawasan, masyarakat membuat satuan pam swakarsa mandiri dengan biaya sendiri. Faktor utama yang mendorong masyarakat ikut berperan serta adalah untuk melindungi fungsi ekologis hutan tersebut sehingga dapat menjaga tata air dan mencegah banjir.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan mengelola hutan secara tidak langsung menunjang keberadaan hutan secara lestari. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah masyarakat yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Tingkat keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan kehutanan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pembagian tersebut sesuai dengan derajat partisipasinya, sehingga dapat diturunkan dari derajat terendah sampai tertinggi yaitu: kelompok yang hanya terlibat dalam pelaksanaan, kelompok yang terlibat sampai perencanaan, kelompok yang terlibat sampai tingkat pengambilan keputusan. Berbeda halnya dengan partisipasi aktif, partisipasi pasif diwujudkan dengan cara membantu eksistensi penguasaan hutan yang sehat di daerah setempat sebagai contoh pedagang pengumpul kayu, dimana kelestarian usahanya ditentukan oleh kontinuitas produksi dari hutan (Hardjanto, 2003).

B. Agroforestri

Agroforestri menggabungkan ilmu kehutanan dan agronomi, serta memadukan usaha kehutanan dengan pembangunan pedesaan untuk menciptakan keselarasan antara intensifikasi pertanian dan pelestarian hutan (De Foresta *et al.*, 2000).

Sistem agroforestri senantiasa memiliki interaksi ekologi, sosial maupun ekonomi di antara komponen-komponen yang ada di dalamnya (Nair, 1993).

Agroforestri memiliki struktur yang serupa dengan hutan alam, umumnya agroforestri memiliki penampilan seperti hutan alam primer atau sekunder karena dominasi pepohonan dan keanekaragaman tumbuhan yang pada tahap awalnya berasal dari hutan alam, agroforestri dapat secara keliru dianggap sebagai hutan alam (De Foresta *et al.*, 2000).

Hairiah *et al.* (2004), menjelaskan bahwa sistem agroforestri merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi, dengan

mamadikan berbagai jenis pohon pada tingkat lahan (petak) pertanian maupun pada suatu bentang lahan (*lansekap*). Pengolahan lahan dengan sistem agroforestri bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan keragaman produksi lahan, sehingga berpotensi memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan bagi para pengguna lahan.

De Foresta *et al.* (2000), mengungkapkan bahwa agroforestri di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua sistem agroforestri yaitu:

1. Sistem agroforestri sederhana

Sistem agroforestri sederhana adalah perpaduan konvensional yang terdiri atas sejumlah kecil unsur atau sering juga dikenal sebagai skema agroforestri klasik. Beberapa contoh tanaman yang bisa ditanam disistem ini adalah tanaman yang memiliki peran ekonomi yaitu kelapa, karet, jati, kopi, pisang, coklat dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran ekologi yaitu, dadap dan petai cina serta tanaman musiman seperti padi, jagung, sayur mayur, rerumputan.

2. Sistem agroforestri kompleks

Sistem agroforestri kompleks adalah sistem yang terdiri dari sejumlah besar unsur pepohonan, perdu, tanaman musiman dan atau rumput. Penampakan fisik dan dinamika di dalamnya mirip dengan ekosistem hutan alam primer maupun sekunder. Sistem agroforestri kompleks bukanlah hutan-hutan yang ditata lambat laun melalui transformasi ekosistem secara alami, melainkan kebun-kebun yang ditanam melalui proses perladangan. Masyarakat dayak membangun *agroforest* di Provinsi Kalimantan Barat dengan pohon *Dipterocarpaceae* (*Dipterocarpaceae*) penghasil buah tengkawang sebagai jenis utama, desa-desa di Provinsi Maluku

dikelilingi oleh kebun-kebun yang memadukan pohon-pohon rempah tradisional yang berasal dari hutan seperti pala dan cengkeh dengan pohon kenari yang juga berasal dari hutan, penduduk Krui di Lampung Barat mendomestifikasi jenis pohon dipterokarpa penghasil damar.

Kegiatan pengelolaan agroforestri telah dipraktikkan dalam pembangunan hutan tanaman sejak tahun 1850-an. Sampai akhir tahun 1960-an, peran agroforestri masih terbatas sebagai sarana meningkatkan keberhasilan permudaan hutan yang dibangun dengan sistem tumpangsari. Dalam sistem ini, penanaman tanaman kayu-kayuan dilakukan oleh petani (disebut pesanggem) yang bekerja tanpa upah namun diperkenankan menanam tanaman pangan di antara tanaman kayu-kayuan. Tanaman pangan seperti: padi, jagung dan kacang-kacangan diusahakan oleh petani selama dua tahun, sambil memelihara tanaman kayu-kayuan. Setelah itu, hutan tanaman dikelola sepenuhnya untuk kayu (Simon, 2000).

Periode 1970 sampai 1990 peran agroforestri bertambah, yaitu sebagai sarana meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam periode ini, jarak tanam (tanaman kayu-kayuan) diperlebar dan tanaman pangan dibudidayakan lebih intensif (menggunakan bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan). Tujuannya adalah memberi waktu yang lebih lama kepada petani membudidayakan tanaman pangan di hutan. Melalui cara ini, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat dan pengelolaan hutan diharapkan lestari (Simon, 2000).

Sobola *et al.* (2015), menjelaskan bahwa agroforestri merupakan sarana menghentikan lingkaran setan deforestasi, erosi tanah dan masalah lingkungan lainnya yang dihadapi negara. Agroforestri mengacu pada kombinasi dari praktik-praktik pertanian dan kehutanan dalam sistem pertanian. Agroforestri berperan sebagai sistem penggunaan lahan, melayani beragam kebutuhan individu petani dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh sistem tanam tradisional. Agroforestri melibatkan kombinasi pohon dan tanaman, sehingga sangat berguna dalam aspek lingkungan dan ekonomi; seperti meningkatkan keamanan pangan, laba, obat-obatan dan kesuburan tanah.

Penerapan pola tanam agroforestri diberbagai daerah berbeda-beda. Studi yang dilakukan Titdoy *et al.* (2014), menunjukan agroforestri yang dikembangkan Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa adalah agrosilvopastural dan agrisilvikultur dengan jenis tanaman kehutanan yaitu cempaka, sedangkan tanaman pertanian yang ditanam berupa jagung, kacang, pisang, tomat, kacang merah, ubi jalar, ubi kayu, cengkeh dan kelapa, sementara ternak yang dipelihara oleh petani adalah sapi dan kuda. Ternak tersebut diikat pada lahan agroforestri yang diterapkan. Agroforestri di Maluku yang dikembangkan adalah dusung pala. Menurut Salampesy *et al.* (2012), dusung pala merupakan salah satu sistem pengelolaan agroforestri di Maluku yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut didukung oleh Patty *et al.* (2014), bahwa selain pala tanaman lainnya yang ditemukan ada dalam dusung adalah tanaman kelapa (*Cocosnucifera*), cengkeh (*Sysigum aromaticum*), kakao (*Theobroma cacao* L) dan kopi (*Arabica Sp.*).

Berbeda dengan di Maluku, Wulandari (2009), menyatakan ada sembilan pola agroforestri yang dikembangkan di Lampung Utara. Agroforestri di daerah ini dilakukan masyarakat di lahan marginal atau bekas alang-alang, pola-pola tersebut yaitu: karet klonal-pagar pohon kayu, karet klonal monokultur, karet klonal-kayu campuran, hutan karet-jengkol, kelapa sawit pagar pohon kayu, kelapa sawit monokultur, kakao-kopi-buah-kayu, jati tanaman pangan, rambutan dan pohon legume-tanaman pangan.

Agroforestri sangat erat kaitannya dengan pemilihan jenis tanaman. Pemilihan jenis tanamanyang ditanam dilahan milik dengan lahan negara biasanya berbeda. Studi yang dilakukan Febryano *et al.* (2009), menjelaskan bahwa alasan petani memilih jenis tanaman pada sistem kepemilikan lahan yang berbeda adalah (1) pendapatan tunai, (2) kontinuitas produksi, (3) periode produksi , (4) perawatan panen yang mudah , (5) proses pasca panen mudah, (6) toleransi untuk ditanam dengan tanaman lain, dan (7) keamanan kepemilikan lahan (terutama di lahan hutan negara). Hal ini didukung Febryano (2008), bahwa petani yang berusaha di lahan hutan negara lebih memilih pola tanam kakao dengan pisang, karena tidak adanya keamanan penguasaan lahan di lahan hutan negara. Dilihat berdasarkan struktur pendapatan rumah tangga, pola tanam tersebut kurang menguntungkan dibandingkan dengan pola tanam kakao dengan petai dan kakao dengan durian. Pemilihan jenis tanaman harus disesuaikan dengan keadaan lahan.

Menurut Hilmanto (2010), usaha perlindungan lahan secara ekonomi,ekologi, dan sosial saat ini diwujudkan dengan sistem agroforestri. Hal ini didukung Kartasapoetra *et al.* (2005), bahwa salah satu upaya untuk pengawetan tanah atau

pengendalian erosi tanah adalah dengan melakukan cara-cara vegetatif, yakni penanaman dengan tanaman kehutanan, penanaman tanaman penutup lahan, penanaman tanaman sejajar dengan garis kontur, penanaman tanaman dalam strip, penanaman tanaman secara bergilir, dan pemulsaan atau pemanfaatan seresah tanaman.

Bukhari dan Febryano (2008), juga menyatakan bahwa pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan keadaan lahan. Pada lahan kritis desain agroforestri yang direkomendasikan adalah jenis tanaman berkayu, jenis non- MPTS lebih *adopted* di daerah punggung bukit. Tanaman MPTS dan tanaman tahunan lebih diarahkan pada daerah lereng dan lembah, sedangkan untuk tanaman semusim/palawija lebih baik ditanam pada bagian lembah.

Agroforestri pada umumnya menghasilkan berbagai produk, antara lain: kayu getah, buah-buahan, kayu bakar serta bahan-bahan lain dari tanaman. Pada saat krisis ekonomi beragam produk yang dihasilkan tersebut bagi penduduk desa memiliki arti dan peran ekologi, sosial dan ekonomi yang sangat penting, apalagi produk yang dihasilkan diantaranya merupakan produk ekspor (Wijayanto, 2002).

C. Performa Pengelolaan Agroforestri

Praktik-praktik kehutanan masyarakat telah berkembang dan tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, dari praktik tersebut diketahui terdapat delapan model pengelolaan hutan tradisional yaitu hutan kemenyan di Tapanuli Utara provinsi Sumatra Utara, wanatani karet di Jambi, repong damar di Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung, tembawang di Sanggau, kebun-kebun durian di Ketapang-

Kalimantan Barat, kebun rotan di Bentian, Lembo di Kalimantan Timur dan hutan adat di Tenganan Bali. Tujuh dari delapan lokasi tersebut merupakan hutan rakyat yang menghasilkan hasil-hasil hutan non-kayu dan satu diantaranya didedikasikan untuk kepentingan religi (Suharjito *et al.*, 2000). Berikut ini adalah gambaran dari model pengelolaan hutan tradisional tersebut:

1. Kebun Kemenyan di Tapanuli Utara, Sumatra Utara

Hutan kemenyan merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam pada masyarakat di Desa Simasom dan Sosor Tambok, Tapanuli Utara. Hasil hutan yang di peroleh adalah getah (resin kemenyan) yang dihasilkan oleh jenis-jenis pohon *styrax* spp. Hutan kemenyan diusahakan di atas lahan yang dikuasai secara individual berdasarkan ketentuan (hukum adat). Hutan kemenyan diusahakan secara komersial sedangkan hasil suplemennya dikonsumsi sendiri (subsisten). Produktivitas getah kemenyan adalah ± 350 kg/ha per tahun. Pada tingkat harga Rp 2.000-Rp 7.000 per kg. Getah kemenyan memberikan pendapatan sebesar $\pm$ Rp 1.400.000/ha per tahun.

Hutan kemenyan telah diusahakan melampaui beberapa generasi, namun keberlanjutannya mengalami tantangan sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan hidupnya. Pihak yang menerima manfaat dari hutan kemenyan adalah pemilik, penggarap, penyewa sebagai penggarap, penggarap bagi hasil dan buruh tani atau buruh sadap sebagai pekerja. Luas kepemilikan lahan hutan kemenyan berkisar 1,0-4,5 ha per keluarga (rumah tangga). Keluarga petani yang tidak memiliki lahan hutan kemenyan dapat menguasai melalui sewa/bagi hasil. Penguasaan hutan kemenyan dapat mencapai

tingkat efisiensi yang tinggi karena struktur *property right* tergolong universal, dapat dipindah tangankan, eksklusif dan *enforceable*.

2. Kebun Karet di Jambi

Kebun karet merupakan bentuk wanatani yang memberikan hasil secara terus menerus dengan resiko rendah. Struktur kebun karet menyerupai hutan alam sekunder. Karet ditanam bercampur dengan pohon buah-buahan, kayu-kayuan, serta semak-semak lainnya yang tumbuh liar. Orientasi usaha pengelolaan kebun karet adalah komersil. Penguasaan wanatani karet berada pada keluarga (individual) yang mengusahakannya langsung. Hasil getah wanatani karet lebih rendah dari karet lokal yaitu 500-1.500 kg/ha/tahun. Akan tetapi wanatani memberikan hasil lain yang cukup tinggi berupa kayu-kayuan, buah-buahan, serta binatang buruan. Dari sisi keberlanjutannya, dapat dikatakan wanatani karet merupakan bentuk pelestarian keanekaragaman hayati pada wilayah yang cukup padat penduduknya.

Berdasarkan tingkat keadilan, wanatani karet menawarkan pekerjaan yang lebih dari lumayan bagi penyadap getah. Umumnya upah penyadap diperoleh dalam bentuk bagi hasil dengan porsi 1:3 untuk karet tua dan 1:2 untuk karet baru. Secara umum setiap keluarga memiliki $\pm 0,2$ ha kebun karet. Efisiensi pengelolaan kebun karet cukup tinggi karena menggunakan anggota keluarga sebagai pekerja sebagai salah satu ciri usaha pertanian keluarga.

3. Kebun Damar di Krui, Pesisir Barat

Shorea javanica atau damar mata kucing merupakan sejenis meranti yang ditanam

oleh masyarakat pesisir Lampung Barat sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dan kebun dari pohon damar tersebut dikenal dengan istilah repong. Bentuk penguasaan lahan repong damar cenderung komunal, orientasi usaha cenderung individual atau biasanya berkelompok, orientasi ini umumnya lebih bersifat komersial untuk getah damar dan subsisten untuk hasil non getah damar kecuali kopi, lada dan sejenisnya. Produktivitas terlihat dari 85% penduduk berkebun damar (sekitar 254 KK) terdapat sekitar 353 bidang repong damar dengan produktivitas 1,5-2 kuintal per bulan.

Kondisi keberlanjutan repong damar menunjukkan indikasi adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas. Di sisi lain keadilan manfaat dari pengusahaan repong damar begitu terbuka untuk sumber penghidupan semua masyarakat. Pengelolaan repong damar dipandang berada dalam kondisi yang efisien karena terpenuhinya berbagai prasyarat berupa keterwakilan serta ketersediaan dan kejelasan batas-batas kewenangan (Suharjito *et al.*, 2000).

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kelola KPHL Rajabasa, dahulu merupakan Kawasan Hutan Lindung Rajabasa Register 3 Kabupaten Lampung Selatan. Hutan Desa yang masuk wilayah KPHL Rajabasa dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Sumur Kumbang. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2016.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, alat tulis, *notebook*, daftar pertanyaan (kuisisioner) dan alat perekam suara. Objek dalam penelitian ini adalah ketua, pengurus, beserta anggota LPHD Sumur Kumbang, LSM Wanacala, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, KPHL Rajabasa, Kepala Desa Sumur Kumbang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDAS HL) Way Seputih Way Sekampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Komisi B Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan Camat Kalianda.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data primer yang dihimpun meliputi :

- a. Karakteristik umum masyarakat, meliputi: nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan dan jumlah anggota keluarga.
- b. Sistem pengelolaan hutan yang terdiri atas penguasaan lahan dan hasil hutan (individu/komunal), orientasi usaha, (subsisten/komersial) dan struktur hutan (monokultur/*agroforest* kompleks).
- c. Performa pengelolaan agroforestri pada kawasan hutan lindung dengan melihat produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat dan efisiensi.
- d. Peran *stakeholder* dalam mendukung atau memfasilitasi pengelolaan agroforestri pada kawasan hutan lindung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen atau publikasi yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Keadaan umum lokasi penelitian, seperti: profil Desa Sumur Kumbang di dalamnya terdapat informasi monografi dan demografi desa.
- b. Data kerangka aturan kelembagaan, seperti: Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan hutan desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPHD dan aturan yang berlaku di desa beserta sanksi.

- c. Data kelembagaan kelompok, seperti: nama kelompok, anggota kelompok, pengurus kelompok, luas areal kelola kelompok, alamat kelompok tani dan struktur organisasi.
- d. Dokumen dari KPHL Rajabasa berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Penetapan Areal Kerja (PAK) dan peta lokasi kawasan hutan lindung.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang akan diolah menjadi sebuah informasi melalui tanya jawab langsung dengan responden yang sesuai dalam batasan penelitian menggunakan alat bantu berupa kuisisioner.

b. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan mencatat serta mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh LPHD Sumur Kumbang selama penelitian berlangsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan menghimpun berbagai literatur yang diperlukan dari lembaga yakni KPHL Rajabasa, Kantor Desa Sumur Kumbang, Kantor Kecamatan Kalianda, LSM Wanacala dan LPHD Sumur Kumbang.

E. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu: *purposive sampling* dan *random sampling*.

1. Sistem Pengelolaan Hutan dan Performa Agroforestri

Purposive sampling merupakan penentuan responden yang dilakukan dengan cara disengaja berdasarkan kriteria tertentu. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih ketua dan pengurus LPHD sebagai informan. Pengurus yang dipilih sebagai informan, adalah: koordinator perencanaan program, koordinator rehabilitasi dan pemeliharaan, koordinator pengamanan kawasan, koordinator pemanfaatan kawasan dan koordinator pengembangan usaha.

Informan tersebut akan menjawab tujuan penelitian, yang pertama mengenai sistem pengelolaan hutan di KPHL Rajabasa dan kedua performa agroforestri di KPHL Rajabasa. Sistem pengelolaan hutan, yaitu: suatu cara atau manajemen yang digunakan dalam mengelola hutan, dalam hal ini yang akan dilihat adalah penguasaan lahan dan hasil hutan, orientasi usaha dan struktur hutan (Suharjito *et al.*, 2000) yang diuraikan dibawah ini:

- a. Penguasaan lahan dan hasil hutan terbagi menjadi dua, yaitu: individual dan komunal. Secara individual didefinisikan sebagai pengelolaan hutan yang seluruh pengambilan keputusannya dilakukan oleh perorangan atau keluarga, sedangkan secara komunal pengelolaan hutan yang pengambilan keputusannya dilakukan bersama anggota suatu masyarakat yang terikat oleh kebudayaannya (Suharjito *et al.*, 2000).

- b. Orientasi usaha, terbagi atas subsisten atau komersial. Subsisten adalah pengelolaan hutan yang produksinya sebagian besar (>50%) digunakan untuk konsumsi langsung oleh keluarga pengelola, komersial adalah pengelolaan hutan yang sebagian besar produksinya untuk di pasarkan (Suharjito *et al.*, 2000).
- c. Struktur hutan terdiri atas monokultur atau *agroforest* kompleks, struktur hutan dalam penelitian ini adalah agroforestri. De Foresta *et al.* (2000), menyatakan agroforestri kompleks adalah sistem-sistem yang terdiri dari sejumlah besar unsur pepohonan, perdu, tanaman musiman dan atau rumput. Penampakan fisik dan dinamika di dalamnya mirip dengan ekosistem hutan alam primer maupun sekunder.

Tujuan penelitian yang kedua yaitu menjelaskan performa pengelolaan agroforestri. Performa agroforestri yang dimaksud adalah tampilan dari pengelolaan agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa yang dikelola oleh LPHD Sumur Kumbang. Penilaian performa dilakukan dengan mengukur keempat variabel dari performa, yaitu: produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat dan efisiensi (Suharjito *et al.*, 2000) yang diuraikan dalam paragraf dibawah ini:

- a. Produktivitas merupakan parameter aspek ekonomi yang diukur dalam pengelolaan agroforestri, produktivitas didefinisikan sebagai hasil atau pendapatan berupa barang per hektar yang diterima pengelola sumberdaya (Suharjito *et al.* 2000). Hal tersebut didukung dengan penelitian Lensari (2011), yang mengungkapkan bahwa produktivitas adalah pendapatan dari usaha mengelola hutan (dalam Rp/tahun), sehingga penelitian ini mengukur

produktivitas dari hasil penjualan suatu jenis tanaman terutama jenis tanaman bukan kayu dalam Rp/ha/tahun.

- b. Keberlanjutan (*sustainability*) merupakan suatu parameter aspek ekologi untuk mengukur pengelolaan agroforestri, didefinisikan sebagai kemampuan suatu agroekosistem untuk menjaga produktivitasnya dari waktu ke waktu (Suharjito *et al.*, 2000). Berdasarkan penelitian Mulyono (2012), keberlanjutan diukur melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan tanaman, seperti melakukan persemaian, pembibitan, peremajaan dan pemeliharaan tanaman.
- c. Keadilan manfaat (*equitabilty*) merupakan parameter aspek sosial untuk mengukur pengelolaan agroforestri. Keadilan manfaat diukur berdasarkan tingkat distribusi penguasaan luas sumber daya dan akses terhadap manfaat yaitu uang, barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat desa.
- d. Efisiensi merupakan parameter aspek sosial dalam mengukur pengelolaan agroforestri. Efisiensi diukur melalui pendekatan kelembagaan untuk melihat jelas tidaknya hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan atau terdefinisinya secara baik komponen *property rights*. Efisiensi juga dilihat dari ada dan dihormatinya aturan main (*rule of the game*) yang disepakati bersama tentang sumber daya yang dikelola serta ada dan jelas tidaknya batasan kewenangan (*jurisdictional boundaries*) (Suharjito *et al.*, 2000).

Random sampling merupakan metode penentuan responden yang dilakukan secara acak. Metode ini digunakan untuk memilih anggota LPHD yang berjumlah

277 orang sebagai informan yang akan menjawab tujuan penelitian mengenai sistem pengelolaan dan performa agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa.

Penentuan responden pada penelitian ini menggunakan batas eror 15% dari jumlah anggota LPHD. Batas eror 15% dianggap sudah cukup mewakili anggota LPHD sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 38 orang. Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Arikunto, 2011) sebagai berikut:

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

Dimana : n = jumlah responden
 N = jumlah anggota LPHD
 e = taraf kesalahan (*error*) sebesar 0.15 (15%)
 1 = bilangan konstan

Dari rumus di atas, maka besarnya jumlah (n) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= 277 / (1 + 277 \times 0.0225) \\ &= 277 / (1 + 6.23) \\ &= 38, 31 \\ &= 38 \text{ responden} \end{aligned}$$

2. Peran *Stakeholder*

Purposive sampling merupakan metode penentuan responden untuk menentukan *stakeholder* atau aktor-aktor kunci yang terkait dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa. *Stakeholder* dipilih sebagai responden untuk memberikan informasi terkait peran dan keterlibatannya dalam mendukung atau memfasilitasi pengelolaan agroforestri yang dilakukan masyarakat Desa Sumur Kumbang di KPHL Rajabasa dengan melihat dan menilai kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*power*). *Stakeholder* tersebut adalah LSM Wanacala, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, KPHL Rajabasa, Kepala Desa Sumur Kumbang, BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung, Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lampung
 Selatan, Komisi B Ekonomi dan keuangan DPRD Lampung Selatan Dinas
 Lingkungan Hidup Lampung Selatan dan Camat Kalianda

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara diolah, dianalisis dan disajikan dalam bentuk data deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan dan Hutan Performa Agroforestri

Variabel sistem pengelolaan hutan digambarkan secara deskriptif dan variabel performa dianalisis dengan memberikan penjelasan secara kuantitatif. Hasil dari analisis data tersebut disajikan dalam suatu matriks hubungan antara sistem pengelolaan hutan dan performanya (Suharjito *et al.*, 2000), matriks tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks hubungan hipotetik dari variabel sistem pengelolaan hutan dan performanya

No.	Variabel Sistem Pengelolaan		Performa			
			Produktivitas	Keberlanjutan	Keadilan manfaat	Efisiensi
1.	Penguasaan lahan dan hasil hutan	Individual				
		Komunal				
2.	Orientasi	Subsisten Komersial				
3.	Struktur hutan	Monokultur				
		Agroforest Kompleks				

Sumber : Suharjito *et al.*, 2000.

Matriks tersebut adalah matriks hubungan hipotetik yang menjelaskan bahwa variabel dari sistem pengelolaan hutan yaitu penguasaan lahan dan hasil hutan yang terdiri atas individual atau komunal, orientasi usaha yang terdiri atas subsisten atau komersial dan struktur hutan yang terdiri atas monokultur atau agroforest kompleks mempengaruhi dan membangun performa yaitu produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat dan efisiensi (Suharjito *et al.*, 2000) pada wilayah KPHL Rajabasa.

Data terkait performa yang meliputi produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat dan efisiensi dimodifikasi dengan dibuat pengategorian agar data tersebut dapat terukur. Pengategorian yang digunakan adalah interval kelas dengan kategori rendah, sedang dan tinggi. Pengategorian ini didapatkan dengan menggunakan teknik skoring dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas (IK)} = \frac{\text{Skor maksimum} - \text{Skor minimum}}{\text{Jumlah Kelas}} \quad (\text{Sugiyono, 2010}).$$

Adapun skor interval kelas diperoleh dari pengukuran dalam kelompok LPHD Sumur Kumbang berdasarkan hasil wawancara. Pengategorian disesuaikan dengan kategori tingkatan yang diinginkan, yaitu 3 (tiga) kelas (rendah, sedang dan tinggi). Kategori tingkatan performa tersebut diperoleh berdasarkan nilai tertinggi dan terendah dari keseluruhan nilai variabel atau total nilai variabel performa pada masing-masing responden. Penentuan ukuran dari variable performa digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Variabel performa

Variabel	Ukuran
Produktivitas	Pendapatan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dihasilkan - rendah : 2.710.000-17.993.333 perhektar/tahun - sedang : 17.993.333-33.276.667 perhektar/tahun - tinggi : 33.276.667-48.560.000 perhektar/tahun
Keberlanjutan	Usaha-usaha untuk mempertahankan keberadaan tanaman (replanting/peremajaan dan pemeliharaan) - rendah : tidak pernah - sedang : jarang (kadang-kadang) - tinggi : sering dilakukan
Keadilan manfaat	Tingkat distribusi penguasaan (luas) sumberdaya hutan - rendah : tidak merata - sedang : merata hanya di sebagian kelompok - tinggi : merata (sama) Tingkat akses terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat: - rendah : hanya bermanfaat bagi pemiliknya saja - sedang : bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya - tinggi : bermanfaat bagi banyak pihak
Efisiensi	Tingkat pemahaman dan kepatuhan responden terhadap: Aturan-aturan tertulis yang mengikat individu atau masyarakat Aturan-aturan tidak tertulis yang mengikat individu atau masyarakat - rendah : tidak paham - sedang : cukup paham - tinggi : paham Tingkat pelanggaran warga terhadap aturan: - rendah : sering - sedang : jarang - tinggi : tidak pernah

2. Peran *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* adalah suatu metode analisis data dengan menggunakan matriks untuk melihat dan menilai peran *stakeholder* dalam mendukung performa pengelolaan agroforestri. *Stakeholder* adalah semua pihak baik secara individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat yang memberikan dampak dan atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan dan atau pembangunan (Iqbal, 2007). Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengetahui kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) *stakeholder*. Analisis *stakeholder* dijelaskan dalam sebuah matriks pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks analisis kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pengelolaan agroforestri

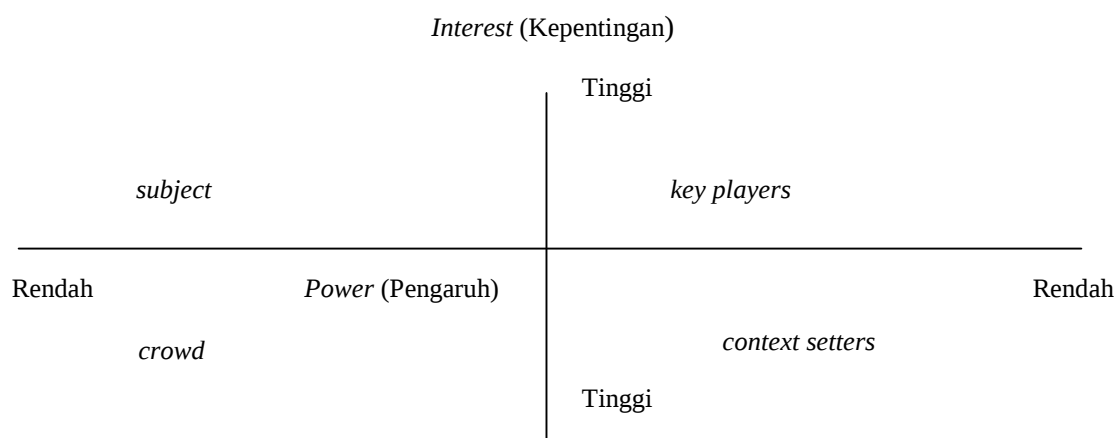
No.	<i>Stakeholder</i>	Kepentingan	Pengaruh terhadap Akses Pengelolaan Agroforestri di Hutan Desa
1.	LSM Wanacala		
2.	Dinas kehutanan Kabupaten Lampung Selatan		
3.	KPHL Rajabasa		
4.	Kepala Desa Sumur Kumbang		
5.	BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung		
6.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		
7.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan		
8.	Komisi B Ekonomi dan keuangan DPRD Kabupaten Lampung Selatan		
9.	Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan		
10.	Camat Kalianda		

Sumber : Reed *et al*, 2009.

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan *stakeholder* terhadap keberhasilan pengelolaan agroforestri. Pengaruh yang dimaksud adalah kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan agroforestri. *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah diklasifikasikan sebagai *subjects* (kotak A). *Stakeholder* ini memiliki kapasitas kewenangan yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya (Reed *et al*.,

2009). *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi diklasifikasikan sebagai *key players* (Kotak B). *Stakeholder* ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh (Reed *et al.*, 2009; Thompson, 2011).

Stakeholder dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah diklasifikasikan sebagai *crowd* (Kotak C). Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki *stakeholder* ini biasanya berubah seiring berjalannya waktu (Reed *et al.*, 2009). *Stakeholder* ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik (Thompson, 2011; Gardner *et al.*, 1986). *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi diklasifikasikan sebagai *context setters* (Kotak D). Hubungan baik dengan *stakeholder* ini harus terus dibina dan segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan (Thompson, 2011). Pengaruh dan kepentingan *stakeholder* tersebut dijelaskan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pemetaan *stakeholder* berdasarkan *interest* (kepentingan) dan *power* (pengaruh) dalam pengelolaan agroforestri di hutan desa yang berada di wilayah KPHL Rajabasa.

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. KPHL Rajabasa

1. Letak dan Luas KPHL Rajabasa

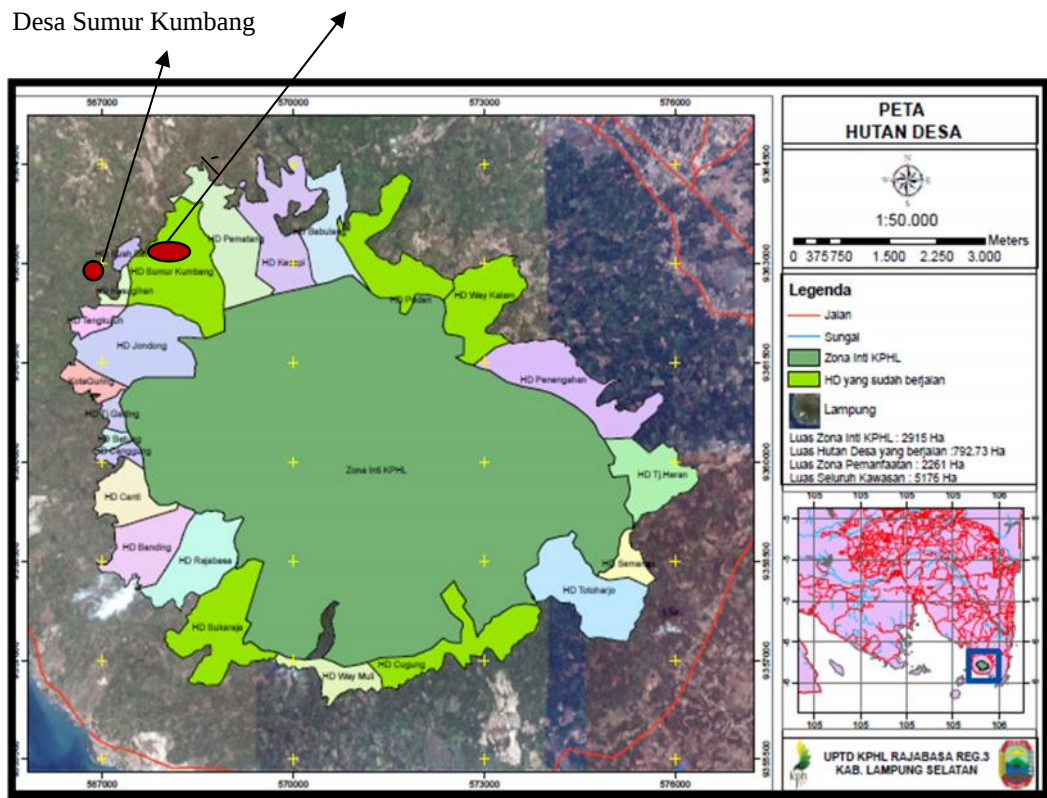
Secara administrasi pemerintahan, KPHL Rajabasa berada di 4 (empat) kecamatan yaitu, Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Bakauheni dan Penengahan.

Terdapat 22 desa di sekelilingnya yang berbatasan langsung dengan KPHL Rajabasa sebagaimana disajikan pada Gambar 2. Adapun batas-batas wilayah KPHL Rajabasa adalah :

- sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- sebelah barat berbatasan dengan Teluk Betung;
- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan; dan
- sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Secara geografis KPHL Rajabasa berada pada 5° 44' 47,88" - 5° 49' 19,42" LS dan 105° 35' 48,00" - 105° 41' 21,00" BT. Luas wilayah KPHL Rajabasa adalah 5.160 ha terdiri dari 176 ha hutan primer, 3.148 ha hutan sekunder dan 1.836 ha non hutan dan panjang keliling batas luar kawasan 60,22 km (KPHL Rajabasa, 2014).

Areal Kerja Hutan Desa di Desa Sumur Kumbang yang dikelola oleh LPHD Sumur Kumbang



Gambar 2. Peta kawasan hutan lindung KPHL Rajabasa.

2. Keadaan Biofisik KPHL Rajabasa

Tanah di wilayah KPHL Rajabasa termasuk jenis tanah andosol coklat tua kemerahan dengan tingkat kepekatan tanah terhadap erosi adalah agak peka. KPHL Model Rajabasa formasi geologinya terdiri dari bahan induk tuva intermedier. Batuan Gunung Rajabasa termasuk ke dalam kelompok *Phono Tephrite* dan *Basaltic Trachy Andesite*. Seri batuan ini masih dalam kelompok basa intermedian (KPHL Rajabasa, 2014).

Berdasarkan kategori tipe iklim Schmidt dan J.H Ferguson, KPHL Rajabasa termasuk kedalam wilayah dengan kategori iklim B dengan rata-rata curah hujan

1.298 mm/tahun dengan intensitas hari hujan 17 mm/hari. KPHL Rajabasa merupakan sumber air bagi penduduk Kalianda dan sekitarnya, termasuk ke dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung. Kebanyakan sungai-sungai yang ada merupakan sungai kecil yang bermuara langsung ke laut karena jarak hutan lindung *relative* dekat dengan laut.

Sungai terbesar yang ada di KPHL Rajabasa disebut oleh masyarakat setempat dengan Way Rajabasa. KPHL Rajabasa termasuk ke dalam tipe hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), sedangkan menurut formasi edafis/ketinggian tempat, termasuk ke dalam zona hutan hujan tropis bawah (*low tropical rain forestry*). Tipe ekosistem KPHL Rajabasa menurut ketinggiannya adalah termasuk ke dalam sub montana yang bercirikan terdiri dari beragam jenis tumbuhan, serta ditandai dengan adanya pohon-pohon yang besar dan tinggi/dominan seperti damar, acung, gantung, gelam, kedaung, dadap, kiara dan banyak lainnya dengan diameter $\pm$ 40-80 m. Terdapat berbagai jenis *epiphyt* seperti anggrek, paku-pakuan serta tumbuhan atas dan tumbuhan bawah lainnya.

Wilayah KPHL Rajabasa dilihat berdasarkan topografinya, terdiri dari beberapa group vulkan andestik. Beberapa vulkan andestik tersebut terdiri dari lereng tengah, lereng bawah dan dataran vulkan bergelombang. Sebagai wilayah pegunungan, topografi di KPHL Rajabasa tergolong berat dengan kelerengan berkisar $\pm$ 25-45% atau termasuk ke dalam kelas lereng 4 (curam) dan 5 (sangat curam).

1. Sejarah KPHL Rajabasa

Gunung Rajabasa ditetapkan oleh pemerintah sebagai Register 3 berdasarkan Besluit Residen Lampung No. 307 Tahun 1941 Tanggal 31 Maret 1941 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan luas wilayah 4.900 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung, Register 3 Gunung Rajabasa ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dengan luas 5.200,50 ha atau 19,6 % dari total luas hutan di Kabupaten Lampung Selatan.

Pengelolaan Register 3 Gunung Rajabasa selanjutnya diserahkan kepada KPHL Rajabasa sebagai pengelola di tingkat tapak melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2011 tentang Penetapan KPHL Model Gunung Rajabasa. Pembentukan KPHL Model Gunung Rajabasa disahkan oleh Bupati Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHL Gunung Rajabasa dengan luas wilayah 5.160 ha.

Menurut luas wilayahnya KPHL Model Rajabasa dibagi kedalam 3 (tiga) Resort Pengelolaan yaitu Resort I mencakup wilayah Penengahan, Resort II wilayah Kalianda dan Resort III Wilayah Rajabasa. Sampai saat ini di wilayah KPHL Model Rajabasa belum ada izin pemanfaatan hutan maupun izin penggunaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun pihak swasta/korporasi.

4. Potensi Wilayah KPHL Rajabasa

a. Potensi Flora

Berdasarkan data dari citra lansat tahun 1999, sebagian besar lahan (61,01%) di wilayah KPHL Model Rajabasa merupakan hutan lahan kering sekunder dan hanya sebagian kecil (3,41%) hutan primer yang terjaga di wilayah ini. Secara lengkap data tutupan lahan di wilayah KPHL Rajabasa disajikan dalam Tabel 4.

Tabel. 4. Tutupan lahan di wilayah KPHL Rajabasa

No.	Tutupan lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Hutan lahan kering primer	175,98	3,41
2.	Hutan lahan kering sekunder	3.147,88	61,01
3.	Semak/belukar	124,38	2,41
4.	Pertanian lahan kering	151,81	2,94
5.	Pertanian lahan kering bercampur semak	1.559,69	30,23
	Jumlah	5.159,75	100,00

Sumber : KPHL Rajabasa, 2014.

Berdasarkan hasil analisis vegetasi diketahui bahwa potensi kayu di wilayah KPHL Model Rajabasa tergolong cukup besar dengan volume mencapai 139,32 m per hektar. Kayu-kayu tersebut terdiri dari jenis-jenis komersil kelas tinggi seperti medang, kungkil, bebeke, arang-arang, balam, bengkal, dan damar. Selain kayu KPHL Rajabasa juga memiliki hasil hutan bukan kayu seperti; getah damar, rotan, durian, pala, petai, jengkol dan buah-buahan lokal yang saat ini keberadaannya sudah sangat sulit dijumpai yaitu, kecap, ketupak dan rukam.

b. Potensi Fauna (Satwa)

Kawasan KPHL Rajabasa merupakan habitat yang sangat baik bagi kehidupan sebagian besar satwa liar tropis. Banyak satwa liar yang tergolong dilindungi dan sangat dilindungi dapat dijumpai di wilayah ini. Secara lengkap berbagai spesies

satwa liar dilindungi yang dapat ditemukan di wilayah KPHL Model Rajabasa ada pada Tabel 5.

Tabel 5. Jenis-jenis satwa liar yang dapat ditemukan di wilayah KPHL Rajabasa

No.	Jenis	Nama Lokal	Nama Ilmiah
1.	Aves	Burung rangkong	<i>Buceros sp</i>
		Elang	<i>Spizaetus batelsi</i>
		Ayam hutan merah	<i>Galus galus</i>
		Burunghantu	<i>Strix leptorammica</i>
		Elang bondol	<i>Haliastur indus</i>
		Elang hitam	<i>Iktinaetus malayensis</i>
		Elang paria	<i>Milvus migrans Collacalia</i>
		Walet sarang hitam	<i>maxima</i>
		Gagak hitam	<i>Corvus enca</i>
2.	Mamalia	Harimau sumatera	<i>Panthera tigris sumatraensis</i>
		Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>
		Macan tutul	<i>Panthera pardus</i>
		Rusa	<i>Cervus timorensis</i>
		Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>
		Babi	<i>Babyrousa babyrousa</i>
		Landak	<i>Hystrx brachyurn</i>
		Tupai	<i>Laricus insignis</i>
3.	Primata	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>
		Siamang	<i>Hylobates malayanus</i>
		Monyet	<i>Macaca fascicularis</i>
4.	Reptil	Lutung abu-abu	<i>Presbytis cristata</i>
		Ular	
		Biawak	

Sumber : KPHL Rajabasa, 2014.

c. Potensi Wisata

1. Wisata Pendidikan

KPHL Model Rajabasa terletak pada ketinggian 0-1.282 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terletak pada titik P.67 yang merupakan puncak tertinggi dari Gunung Rajabasa dengan ketinggian 1.282 meter di atas permukaan laut.

Rentang ketinggian tempat yang begitu lebar membuat jenis flora dan fauna yang mampu hidup di wilayah ini sangat beragam, mulai dari flora dan fauna dataran

rendah sampai dataran tinggi. Beragamnya jenis flora dan fauna tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk kegiatan pendidikan, pengkajian, pariwisata, penangkaran dan pemanfaatan lain secara bijaksana dengan menganut azas kelestarian.

2. Wisata Alam dan Petualangan

KPHL Rajabasa memiliki vegetasi yang cukup baik dengan tutupan lahan hutan mencapai 63,42 % merupakan potensi besar bagi pengembangan wisata alam dan petualangan di wilayah ini. Lokasinya yang dekat dengan Kota Kalianda (8,5 km dari pusat kota) dan perairan Teluk Lampung serta Selat Sunda menambah indah panorama di kawasan ini, terutama jika dilihat dari ketinggian. Lokasi Gunung Rajabasa dekat dengan kawasan pariwisata pantai yang sudah lebih dahulu ada seperti batu kapal, pantai canti, banding resort, pantai wartawan dan pantai kahai. Pesona anak Gunung Krakatau dapat dilihat dari sekitar pantai tersebut. Beberapa objek andalan sebagai daya tarik wisata di wilayah ini antara lain:

- Danau

Terdapat sebuah danau yang terletak di atas puncak gunung. Danau ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata alam dan ziarah. Di tepi danau ini terdapat batu cukup. Terdapat mitos bahwa sebanyak apapun orang yang berdiri atau duduk di atas batu tersebut akan selalu cukup.

- Air Panas Way Belerang

Merupakan sebuah mata air alami yang mengeluarkan air panas dengan kandungan belerang. Sumber air panas ini dapat dijangkau dengan mudah karena lokasinya

yang dekat dengan desa hanya 2 km dari Desa Kecapi dan terdapat jalan *track* dengan kondisi yang sangat baik.

- Air Terjun

KPHL Rajabasa memiliki potensi air terjun yang sangat indah yaitu, air terjun Way Kalam, air terjun Tanjung Heran, air terjun Cugung, air terjun Semanak, air terjun Pangkul Sukaraja, air terjun Canti, air terjun Kecapi dan air terjun Way Guyuran.

d. Potensi Pertambangan dan Energi

Wilayah KPHL Rajabasa memiliki potensi langka yaitu energi panas bumi (geothermal). Energi tersebut belum diketahui secara pasti berapa besarnya yang dapat dimanfaatkan namun, saat ini wacana untuk pemanfaatan sumber panas bumi tersebut sudah mulai didengungkan. Selain panas bumi terdapat juga sumber air panas Way Belerang yang mengandung potensi mineral berupa belerang. Belerang merupakan zat yang telah diketahui secara luas berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit.

e. Potensi Jasa Lingkungan

KPHL Rajabasa merupakan kawasan lindung bagi pengawetan kesuburan tanah serta pengatur tata air. Kawasan yang hijau dan didominasi oleh hutan alam primer merupakan paru-paru bagi wilayah Kalianda dan sekitarnya. Potensi sumber air permukaan yang ada dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat kota Kalianda, maupun perusahaan air minum, baik swasta maupun pemerintah.

B. Desa Sumur Kumbang

1. Letak dan Luas Desa Sumur Kumbang

Desa Sumur Kumbang secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Desa tersebut berada disekitar wilayah kelola KPHL Rajabasa. Batas-batas wilayah Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah yang lain adalah sebagai berikut :

- batas wilayah bagian Utara : Desa Buah Berak
- batas wilayah bagian Timur : Desa Pematang
- batas wilayah bagian Selatan : Kawasan Gunung Rajabasa
- batas wilayah bagian Barat : Desa Way Belerang

Luas wilayah desa tersebut adalah 378 ha yang terdiri dari lokasi pemukiman, lokasi sekolahan, lokasi perkuburan, lokasi olahraga, lokasi perkebunan (tanah marga), lokasi jalan umum, lokasi persawahan, lokasi sarana peribadahan dan lokasi pekarangan rumah penduduk seperti dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Luas wilayah menurut penggunaan

No.	Penggunaan lahan	Luas lahan (ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	41	10,85
2.	Persawahan	11	2,91
3.	Perkebunan	317	83,87
4.	Kuburan	1	0,27
5.	Perkantoran	0,5	0,12
6.	Luas pekarangan	2,5	0,66
7.	Prasarana umum dan tempat ibadah	5	1,32
Total penggunaan lahan		378	100

Sumber : Monografi Desa Sumur Kumbang, 2014.

2. Gambaran Umum Masyarakat Desa Sumur Kumbang

Masyarakat Sumur Kumbang merupakan masyarakat transmigran dari Banten, mereka pertama ke Lampung tahun 1785. Awalnya Desa Sumur Kumbang masih tergabung dalam wilayah Desa Kesugihan yang mayoritas masyarakatnya asli dari keturunan suku Lampung dengan kepala kampung yang pertama saat itu adalah Bapak Wadi tahun 1850. Terjadi pemekaran wilayah di tahun 1856-1857, sehingga Desa Sumur Kumbang terpisah dari Desa Kesugihan.

Masyarakat Desa Sumur Kumbang telah lama mengelola wilayah KPHL Rajabasa. Sebagian besar masyarakat yang mengelolanya adalah suku Lampung dan Sunda Banten yang bermata pencarian utama sebagai petani. Mereka memanfaatkan kawasan hutan dengan menanam jenis-jenis tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) menggunakan pola tanam agroforestri atau pola *Repong* (bahasa lokal) yaitu dalam satu wilayah ditanami berbagai jenis tanaman sehingga mereka menikmati hasil tanaman yang beragam, ada bulanan dan ada tahunan.

Agroforestri di KPHL Rajabasa terbentuk melalui pembukaan lahan hutan oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang. Tahun pertama masyarakat mulai berhumas dengan menanam padi gogo, palawija, sayur-sayuran, kopi, lada dan durian di tahun 1950. Bibit durian tersebut diperoleh dari pohon durian di kawasan yang sudah ada sejak tahun 1930. Masyarakat mulai memperkaya tanaman di lahan kelolanya dengan pohon damar pada tahun 1960. Hal tersebut menunjukkan bahwa agroforestri yang terbentuk, menurut De Foresta *et al.* (2000), merupakan agroforestri kompleks.

Ketergantungan masyarakat terhadap lahan hutan semakin tinggi, sehingga lahan kelola baru semakin banyak dibuka dari tahun ke tahun. Pohon damar diganti dengan tanaman kopi dan pohon cengkeh di tahun 1972. Hasil dari kopi dan cengkeh belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga mereka menanam petai di tahun 1974-1975. Selain memanfaatkan hutan untuk berkebun, masyarakat juga bermukim di kawasan. Keadaan tersebut membuat pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan Rehabilitasi Lahan Hutan (RHL) melalui penanaman bibit sonokeling dan kaliandra di KPHL Rajabasa pada tahun 1980-1981.

Pemerintah melanjutkan upayanya dalam memperbaiki kawasan hutan dengan merelokasi masyarakat yang berkebun dan bermukim di wilayah KPHL Rajabasa pada tahun 1982-1983. Sejak saat itu masyarakat tidak diizinkan lagi bermukim di kawasan tersebut; namun mereka tetap diperbolehkan mengelola lahan dengan menanam jenis tanaman serba guna atau yang sering disebut MPTS. Masyarakat memperbanyak menanam tanaman musiman dan tanaman lainnya agar hasilnya dapat diambil setiap saat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menanam kakao dan pisang pada tahun 2005 sebagai salah satu tanaman utama di lahan kelolanya hingga saat ini.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sumur Kumbang

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Sumur Kumbang berjumlah 285 KK atau 1.203 jiwa yang terdiri atas 593 laki-laki dan 610 perempuan (Tabel 7). Sebagian besar penduduk berasal

dari suku Sunda (Jawa Barat) jumlahnya 1.143 jiwa, sedangkan yang berasal dari suku Lampung hanya berjumlah 40 jiwa, suku Padang berjumlah 8 jiwa dan suku Jawa berjumlah 12 jiwa.

Tabel 7. Jumlah penduduk di Desa Sumur Kumbang

No.	Jenis kelamin	Jumlah jiwa Persentase (%)	
1.	Laki-laki	593	49,29
2.	Perempuan	610	50,70
Jumlah Penduduk		1.203	100,00

Sumber : Monografi Desa Sumur Kumbang, 2014.

Penduduk Desa Sumur Kumbang 1.203 jiwa (100%) beragama Islam. Mereka tergolong sangat antusias di dalam pelaksanaan ibadah (sholat lima waktu), setiap malam jumat para generasi muda (Risma Al-Ikhlas) dan kelompok bapak-bapak melakukan pengajian, marhabanan dan mendengarkan ceramah agama. Pengajian kelompok ibu-ibu dilakukan setiap hari minggu, dalam pelaksanaannya pengajian dilakukan secara bergilir dengan keliling kewilayah desa yang ada di Kecamatan Kalianda.

b. Mata Pencarian

Sumber mata pencarian utama masyarakat Desa Sumur Kumbang adalah mengusahakan lahan yaitu bertani baik lahan milik pribadi (tanah marga) maupun lahan milik negara. Masyarakat lainnya berprofesi sebagai PNS, pengepul, wiraswasta, tukang bengkel dan buruh. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di lahan marga hanya sedikit, mereka lebih banyak yang mengelola lahan di KPHL Rajabasa.

c. Tingkat pendidikan

Secara formal tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumur Kumbang rata-rata rendah. Terdapat 20 orang buta huruf, 12 orang tidak sekolah, 85 orang belum sekolah, 82 orang sekolah rakyat, 25 orang pendidikan pesantren, 195 orang sekolah dasar, 98 orang sekolah menengah pertama, 40 orang sekolah menengah umum, 4 orang perguruan tinggi diploma 3 (D3) dan 3 orang perguruan tinggi Strata1 (S1) dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sumur Kumbang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1.	Buta huruf	20	3,54
2.	Tidak sekolah	12	2,12
3.	Belum sekolah	85	15,07
4.	Pendidikan pesantren	25	4,43
5.	Sekolah Rakyat (SR)	82	14,53
6.	Sekolah Dasar (SD)	195	34,57
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	98	17,37
8.	Sekolah Menengah Umum (SMU)	40	7,09
9.	Perguruan Tinggi Diploma (D3)	4	0,70
10.	Perguruan Tinggi Strata 1 (S1)	3	0,53
Total		564	100

Sumber : Monografi Desa Sumur Kumbang, 2014.

d. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Sumur Kumbang terdiri dari berbagai suku seperti, penduduk asli Lampung, Sunda Banten, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Kekerabatan terbangun dalam ikatan satu garis keturunan nenek moyang baik itu suku asli Lampung maupun suku pendatang di desa-desa sekitar Gunung Rajabasa. Berbagai suku ada di

dalam Desa Sumur Kumbang namun, mereka tetap saling membaaur dan kompak ini dapat dilihat dengan aktivitas gotong royong dalam kegiatan bercocok tanam yang dilakukan ketika membuka lahan perkebunan baru, masyarakat saling membantu sehingga rasa kekeluargaan terpelihara sangat baik.

Hal tersebut sudah terjalin sejak lama, kegiatan sosial lainnya yaitu pembuatan dan perbaikan sarana fisik untuk masyarakat seperti pembersihan jalan desa, WC umum, aliran anak sungai menuju desa, selang-selang air untuk air bersih, pembuatan dan perbaikan sarana olahraga (lapangan voli dan lapangan sepak bola), perbaikan tempat ibadah (masjid), serta perbaikan dan pembersihan sarana pendidikan (sekolah) juga dilakukan secara bergotong royong. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dan pemecahan persoalan dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

C. Karakteristik Umum Responden Penelitian

1. Umur

Sebagian besar responden penelitian tergolong dalam umur produktif (15-59 tahun) sehingga responden penelitian masih potensial dan produktif untuk melakukan kegiatan mengelola hutan dan kegiatan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang mengelola agroforestri di KPHL Rajabasa adalah petani dari berbagai klasifikasi umur, tidak hanya yang berumur tua, tetapi juga yang masih berumur relatif muda dengan selang antara 21 sampai 75 tahun dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sebaran umur responden

No.	Kelompok Umur Responden (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	21 – 30	4	8,89
2.	31 – 40	17	37,78
3.	41 – 50	13	28,89
4.	51 – 60	8	17,78
5.	61– 70	2	4,44
6.	≥ 71	1	2,22
	Jumlah	45	100,00

Sumber : Data penelitian, 2016.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan formal responden LPHD Sumur Kumbang termasuk pada kategori rendah dapat dilihat pada Tabel 10. Anggota LPHD Sumur Kumbang sebagian besar (62%) hanya mengenyam pendidikan SD bahkan ada 4,44% responden yang tidak mengenyam pendidikan formal. Tingkat pendidikan responden hingga SLTP adalah sebanyak 15,55%, tingkat pendidikan hingga SLTA sebanyak 17,78% dan tidak ada responden yang memiliki tingkat pendidikan hingga akademi/perguruan tinggi.

Tabel 10. Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah	2	4,44
2.	SR/SD	28	62,22
3.	SLTP	7	15,55
4.	SLTA	8	17,78
5.	Akademi/PT	0	0,00
	Jumlah	30	100,00

Sumber : Data penelitian, 2016.

2. Jumlah Anggota Keluarga

Besar kecilnya jumlah anggota keluarga memberikan kontribusi dalam ketersediaan tenaga kerja, sehingga mempengaruhi pemasukan keluarga dan konsumsi keluarga. Jumlah anggota keluarga responden dalam penelitian ini berkisar antara 2-9 jiwa (Tabel 11).

Tabel 11. Jumlah anggota keluarga responden

No.	Jumlah Anggota Keluarga Responden (jiwa)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	1 – 2	4	8,89
2.	3 – 4	26	57,78
3.	5 – 6	11	24,44
4.	7 – 8	3	6,67
5.	≥ 9	1	2,22
Jumlah		45	100,00
Rata-rata		4,22	

Sumber : Data penelitian, 2016.

Tabel 11 menunjukan bahwa persentase responden yang memiliki jumlah anggota keluarga dibawah 6 orang dan atau sama dengan 6 orang adalah 91,11% (41 responden) dan persentase untuk jumlah anggota keluarga di atas 7 orang sebanyak 8,89% (4 responden). Anggota keluarga merupakan sumber tenaga kerja dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa. Apabila ketersediaan tenaga kerja dalam rumah tangga untuk pengelolaan kegiatan agroforestri tersebut tidak ada atau kurang, maka masyarakat akan memanfaatkan tenaga kerja dari pihak keluarga terdekat dan tetangga.

4. Mata Pencarian

Sebagian besar mata pencarian pokok responden adalah bertani mengelola lahan di KPHL Rajabasadapat dilihat pada Tabel 12. Ada sebanyak 36 responden (80,00%) yang memiliki mata pencarian pokok sebagai petani; sementara responden dengan mata pencarian pokok bukan petani yaitu, PNS, tukang bengkel, pengepul, pemborong, pegawai swasta dan buruh, tetap melakukan kegiatan pengelolaan agroforestri sebagai pekerjaan sampingan.

Tabel 12. Mata pencarian pokok responden

No	Mata Pencarian Pokok Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Petani	36	80,00
2.	PNS	1	2,22
3.	Pemborong	1	2,22
4.	Pegawai swasta	2	4,44
5.	Pengepul	1	2,22
6.	Buruh	3	6,67
7.	Tukang bengkel	1	2,22
Jumlah		45	100,00

Sumber : Data penelitian, 2016.

Kegiatan pengelolaan agroforestri dilakukan oleh responden tersebut pada saat waktu senggang atau di luar jam kerja dari melakukan pekerjaan pokoknya dan atau dibantu oleh keluarga dan/atau tetangga yang dipekerjakan dengan sistem upah untuk membantu mengelola lahannya.

1. Luas Kepemilikan Lahan Agroforestri

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 403/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Areal Kerja (PAK) hutan desa, masyarakat di Desa Sumur Kumbang dapat mengelola wilayah KPHL Rajabasa

dengan luas 217 ha. Luas lahan agroforestri yang dikelola oleh responden penelitian berkisar antara 0,25 ha – 3,0 ha. Rata-rata luas lahan garapan agroforestri untuk seluruh responden adalah 0,78 ha. Luas lahan yang dikelola tersebut dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas kepemilikan lahan agroforestri responden

No.	Luas Kepemilikan Agroforestri (ha)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	0,1 – 0,5	22	48,89
2.	0,6 – 1,0	5	11,11
3.	1,0 – 1,5	13	28,88
4.	1,5 – 2,0	2	4,44
5.	2,0 – 2,5	2	4,44
6.	2,5 – 3,0	1	2,22
Jumlah		45	100,00

Sumber : Data penelitian, 2016.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang di wilayah KPHL Rajabasa terdiri atas penguasaan lahan dan hasil hutan yang dikuasai secara individu, orientasi usaha agroforestri sebagian besar bersifat komersial namun, ada juga yang subsisten dan struktur hutan adalah agroforestri kompleks. Sistem pengelolaan hutan tersebut mempengaruhi performa agroforestrinya.

Performa agroforestri meliputi; produktivitas agroforestri termasuk dalam kategori sedang karena sebagian besar hasil panen seperti kakao, petai, pisang dan durian terserang hama dan penyakit sehingga hasil panennya tidak optimal. Tingkat keadilan manfaat termasuk dalam kategori sedang, karena luas lahan yang dikelola oleh masyarakat tidak sama dan distribusi manfaat agroforestri hanya diperoleh oleh sebagian masyarakat sekitar hutan yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan dan pemanenan. Tingkat efisiensi termasuk dalam kategori sedang dimana aturan formal belum sepenuhnya berjalan karena masih terjadi pelanggaran dan tidak ada penegakan hukumnya, namun aturan informal sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Tingkat keberlanjutan termasuk dalam kategori sedang; masyarakat telah melakukan upaya mempertahankan

agroforestri dan menjaga fungsi hutan diantaranya yaitu perbanyak tanaman, penyemaian, pembibitan, peremajaan dan pemeliharaan.

Pengelolaan agroforestri yang dijalankan tersebut difasilitasi dan didukung oleh *stakeholder* terkait yang berkerjasama dalam membantu LPHD Sumur Kumbang memperoleh izin hutan desa. *Stakeholder* tersebut yaitu KPHL Rajabasa, Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, LSM Wanacala, Kepala Desa Sumur Kumbang, BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Komisi B Ekonomi dan Keuangan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan dan Camat Kalianda.

B. Saran

KPHL Rajabasa serta *stakeholder* terkait harus melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal secara terus menerus agar pengelolaan agroforestri dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga petani dapat mandiri secara finansial, sumber daya hutan dapat didistribusikan secara adil dan kelestarian hutan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A.Y. 2015. Skema hutan kemasyarakatan (HKm) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan SDA di Hutan Sesaot. Lombok Barat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 3 (3) : 91-100.
- Anomsari, T. E. 2014. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (kasus di Kecamatan Karangayam Kebumen). *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. 3 (16) : 1-15.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Buku. Rineka Cipta. Jakarta. 370 hlm.
- Bukhari dan Febryano, I.G. 2008. Desain agroforestry pada lahan kritis (studi kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Perennial*. 6 : 53-59.
- Darusman, D. 2012. *Kehutanan Demi Keberlanjutan Indonesia*. Buku. IPB Press. Bogor. 130 hlm.
- De Foresta, H., Kusworo, A., Michon, G dan Djatmiko, W.A. 2000. *Ketika Kebun Berupa Hutan, Agroforest Khas Indonesia Sebuah Sumbangan Masyarakat*. Buku. International Centre for Research in Agroforestry; Institut de Recherche Pour le Developpement; Ford Foundation. Bogor. 223 hlm.
- Desa Sumur Kumbang. 2014. *Peraturan Desa Sumur Kumbang tentang Pengelolaan Hutan Desa Nomor 6 tahun 2014*. Buku. Kepala Desa Sumur Kumbang. Lampung Selatan. 13 hlm.
- Desa Sumur Kumbang. 2014. *Profil Desa Sumur Kumbang*. Buku. Kepala Desa Sumur Kumbang. Lampung Selatan. 5 hlm.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C dan Hidayat, A. 2014. The roles and sustainability of local institution of mangrove management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20 (2) : 69-76.
- Febryano. I.G, Suharjito, D dan Soedomo, S. 2009. Pengambilan keputusan pemilihan jenis tanaman dan pola tanam di lahan hutan negara dan lahan milik: Studi kasus di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *Jurnal Forum Pascasarjana*.

32 : 54-64.

Febryano. I.G. 2008. Analisis finansial agroforestri kakao di lahan hutan negara dan lahan milik. *Jurnal Perennial*. 4 : 41-47.

Firmansyah, E. 2013. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kawasan Hutan Lindung Desa Mandala Mekar Kecamatan Jati Waras Kabupaten Tasik Malaya*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 99 hlm.

Gardner, J.R., Rachlin, R dan Sweeny, H.W.A. 1986. Handbook of Strategic Planning. http://www.12manage.com/methods_stakeholder_mapping.html. Diunduh pada tanggal 23 Juli 2016.

Hairiah, K., Widiyanto., Suprayogo, D., Widodo, R.H., Purnomosidhi, P., Rahayu, S dan Van Noordwijk, M. 2004. *Ketebalan Serasah sebagai Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Sehat*. Buku. Word Agroforestry Center (ICRAF). Bogor. 52 hlm.

Hardjanto. 2003. *Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat Di Pulau Jawa*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. 258 hlm.

Hardiansyah, G. 2012. Analisis peran berbagai stakeholder dalam menyongsong era pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang. *Jurnal Eksos*. 8 (3) : 186-194.

Hilmanto, R. 2010. Analisis penelusuran dan perekaman teknik pengelolaan lahan untuk standardisasi kegiatan produksi komoditas agroforestri lokal. *Jurnal Standardisasi*. 12 (2) : 69-78.

Iqbal, M. 2007. Analisis pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*. 26 (3) : 89-99.

Iskandar., Paranoan, D. B dan Djumlani, A. 2013. Implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. *Journal Administrative Reform*. 1 (2) : 525-537.

Kadir, W., A., Awang, S.A., Purwanto, R.H dan Poedjirahajoe, E. 2013. Analisis stakeholder pengelolaan Taman Nasional Banti Murung Bulusaraung, provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 20 (1) : 11-21.

Kartasapoetra, A.G dan Sutedjo, M.M. 2005. *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Buku. Rineka Cipta. Jakarta. 204 hlm.

KPHL Rajabasa. 2014. *RPHJP KPHL Rajabasa 2014–2023*. Buku. Kepala KPHL Rajabasa. Lampung Selatan. 41 hlm.

- Latupapua, Y., T. 2015. Implementasi peran *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*. 10 (1): 21-30.
- Lensari, D. 2011. *Kinerja Pengelolaan Repong Damar Ditinjau dari Aspek Ekologi, Sosial dan Ekonomi*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 73 hlm.
- Lestari, S dan Premono, B.T. 2014. Penguatan agroforestri dalam upaya mitigasi perubahan iklim: kasus Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11 (1) : 1-12.
- Martin, E., Winarno, B., Febryano, I.G dan Ichsan, A.C. 2010. *Insentif pemungkin aksi kolektif pembangunan hutan tanaman rakyat berbasis agroforestri; pelajaran dari kasus pemanfaatan lahan gambut*. Prosiding Seminar Nasional Agroforestri II. Mataram, 27 Januari 2010. Hlm 175-191.
- Mulyono, M.M.B. 2012. *Modal Sosial dalam Pengelolaan Kebun Hutan (Dukuh)di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis. Insitut Pertanian Bogor. Bogor. 144 hlm.
- Nair, P.K.R. 1993. *An Introduction to Agroforestry*. Buku. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. 499 hlm.
- Pulhin, J.M. 2006. Environmental impacts of community-based forest management in the Philippines. *Jurnal Environment and Sustainable Development*. 5 (1): 46-56.
- Patty, R.N., Rumatatu, F.J dan Polnaya, F. 2014. Pengelolaan dusung pala (*Myristica fragrans* houtt.) di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Budidaya Pertanian*. 10: 105-114.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy,N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H dan Stringer, L.C. 2009. Who's in and why? a typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*. 90 : 1933-1949.
- Sadono, Y. 2013. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan taman nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 9 (1) : 53-64.
- Safe'i, R., Hardjanto, Supriyanto dan Sundawati, L. 2015. Pengembangan metode penilaian kesehatan hutan rakyat sengon (*Falcataria moluccana* (Miq.) Barneby & J.W. Grimes). *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 12 (3) 175-187.

- Salam, M.D., Abdus dan Noguchi, T. 2006. Evaluating capacity development for participatory forest management in Bangladesh's sal forests based on 4rs stakeholder analysis. *Forest Policy and Economics*. 8 : 785–796.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Martin, E., Siahaya, M.E dan Papilaya, R. 2015. Cultural capital of the communities in the mangrove conservation in the coastal areas of ambon dalam bay, moluccas. *Procedia Environmental Sciences*. 23: 222 – 229.
- Salampessy, M. L., Bone, I dan Febryano. I.G. 2012. Performansi dusung pala sebagai salah satu agroforestri tradisional di Maluku. *Jurnal Tengawang*. 2: 55-65.
- Santoso, H. 2011. Hutan kemasyarakatan dan hutan desa: tafsir setengah hati pengelolaan hutan berbasis masyarakat versi Kementerian Kehutanan RI. *Jurnal Kehutanan Masyarakat*. 3 (1) : 53-78.
- Senoaji, G. 2012. Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry oleh masyarakat Baduy di Banten Selatan. *Jurnal Bumi Lestari*. 12 (2) : 283–293.
- Simon, H. 2000. *Hutan Jati dan Kemakmuran: Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Buku. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 224 hlm.
- Sitepu, Y.F. 2014. *Kontribusi Pengelolaan Agroforestri Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Studi Kasus di Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. 36 hlm.
- Sobola, O.O., Amadi, D.C dan Jamala, G.Y. 2015. The role of agroforestry in environmental sustainability. *Journal of Agriculture and Veterinary Science*. 8 (5) : 20-25.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Buku. Alfabeta. Bandung. 389 hlm.
- Suharjito, D. 2014. *Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Orasi Ilmiah Guru Besar IPB)*. Buku. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 44 hlm.
- Suharjito D dan Putro, H.R. 2013. *Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru: Refleksi dan Inovasi Pemikiran*. Buku. IPB Press. Bogor. 322 hlm.
- Suharjito, D., Khan, A., Djatmiko W.A, Sirait M.T dan Evelyn, S. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Buku. Pustaka Kehutanan Masyarakat. Bogor. 124 hlm.
- Sylviani dan Hakim, I. 2014. Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi

Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11 (4) : 309- 322.

Thompson, R. 2011. Stakeholder Analysis. Winning Support for Your Projects. http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm. Diunduh pada tanggal 22 September 2016.

Titdoy, S., Thomas, A., Saroinsong, F.B dan Kainde, R.P. 2014. Sistem agroforestri di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Budidaya Pertanian*. 9: 1-15.

Van Noordwijk, M., Agus, F., Suprayogo, D., Hairiah, K., Pasya, G., Verbist, B dan Farida. 2004. Peranan agroforestri dalam mempertahankan fungsi hidrologi daerah aliran sungai (DAS). *Jurnal Agrivita*. 26 (1) : 1-8.

Wakka, A. K. 2014. Analisis *stakeholders* pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3 (1): 47-55.

Wijayanto, N. 2002. Analisis strategi sistem pengelolaan repong damar di Pesisir Krui Lampung. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 8: 39-49.

Winata, A dan Yuliana, E. 2012. Tingkat partisipasi petani hutan dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) perhutani. *Jurnal Mimbar*. 28 (1) : 65-76.

Wulandari, C. 2009. Identifikasi pola agroforestri yang diimplementasikan masyarakat pada lahan marjinal di Lampung Utara. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 14 (3) : 158-162.